

**REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM
KETAHANAN PANGAN BERBASIS SISTEM KEARIFAN LOKAL GUNA
MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN**

**Rachmad Syafa'at
Esmi Warrasih Pujirahayu
Aan Eko Widiarto**

Abstracts

The existence of the Tengger Traditional Community wisdom system in Ngadas Village, Malang Regency managing food crops agriculture and natural resources is partly apparent, developed, and continuous until now. The main problem of his study is how to set up a political law reconstruction model of local Tengger Traditional Community wisdom based food sustainability for establishing food sovereignty. The study utilizes two approach methods, the first being the normative approach is to analyze various law regulations, policies, and political laws related with statewide food sustainability and the implementations on the Tengger customs society. Meanwhile, the socio legal approach is to examine the presence of the local wisdom system and noticeable conflicts in the natural resource management experienced by the Tengger Traditional Community. The findings from this research reveal that the co-management model implementation are required to share commitment among the government and the public to be equally open, responsible, and strengthen their participation in a local wisdom system based food sustainability political law reconstruction in order to establish food sovereignty, either on the national, provincial, as well as city / regency level.

Key words: Law Politics, Food Sustainability, Food Souverignity

Abstrak

Keberadaan sistem kearifan Masyarakat Adat Tengger Desa Ngadas Kabupaten Malang dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian tanaman pangan sebagian masih eksis, hidup, berkembang dan berlanjut sampai saat ini. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bagaimana merekonstruksi model politik hukum ketahanan pangan berbasis pada system kearifan lokal Masyarakat Adat Tengger yang dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif (*normative approach*) untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan dan kebijakan serta politik hukum yang terkait dengan ketahanan pangan nasional dan imlementasinya pada masyarakat adat Tengger. Sedangkan pendekatan sosio legal (*socio legal approach*) untuk mengkaji keberadaan sistem kearifan lokal serta konflik yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dialami Masyarakat Adat Tengger. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa diperluka model rekontruksi politik hukum ketahanan pangan melalui model *Co-management* yang mensinergikan kelembagaan ketahanana pangan yang dimiliki pemerintah dengan kelembagaan kedaulatan pangan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat Tengger.

Kata kunci: Politik Hukum, Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan